

## PPKM Darurat Diperpanjang atau Tidak, Polda Metro Ikut Kebijakan Pemerintah

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya akan mengikuti kebijakan pemerintah terkait Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pertama berakhir pada Selasa (20/7) kemarin.

"Belum ada, belum ada (langkah-langkah)," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/7).

Sambodo menjawab pertanyaan apakah ada langkah terbaru dari kepolisian menjelang berakhirnya PPKM darurat.

Sambodo belum mau berkomentar lebih lanjut terkait penerapan penyesatan PPKM darurat. Sambodo mengatakan pihaknya akan mengikuti apapun kebijakan pemerintah nanti. "Nanti (aturan) penyesatan akan mengikuti pemerintah. Kalau memang PPKM diperpanjang, nanti akan kita perpanjang juga," jelas Sambodo.

Polda Metro Jaya telah membuat total 100 titik penyesatan lokasi PPKM Darurat. Titik titik itu berada di ruas jalan tol, jalan protokol, dalam kota, hingga perbatasan menuju Jakarta.

Jumlah tersebut bertambah secara bertahap. Awalnya, polisi menyiapkan 63 titik sekat menuju DKI pada awal pelaksanaan PPKM darurat. Jumlah tersebut berangsur naik.

Sebagai informasi, sejak Kamis (15/7) total ada 100 titik sekat yang disiapkan Polda Metro Jaya. Saat itu polisi menilai Mobilitas masyarakat tetap tinggi meski adanya penyesatan.

"Tanggal 5 Juli itu sempat turun mobilitas di angka 30 persen. Tanggal 11 Juli penurunan mobilitas di bawah 20 persen. Sehingga kemudian warnanya hitam. Padahal target di PPKM mikro ini target penurunan mobilitas antara 30-50 persen," terang Sambodo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (14/7).

Menurut Sambodo, mobilitas di batas kota masih bisa ditekan. Namun pergerakan di dalam kota justru meningkat.

Kini, kelanjutan aturan penyesatan itu tergantung dari putusan pemerintah pusat perihal PPKM. Hingga memasuki hari terakhir pelaksanaan PPKM darurat, pemerintah pusat belum mengumumkan diperpanjang atau tidaknya aturan tersebut. • **lus**

## Kabareskrim: Tindak Tegas yang Ganggu Upaya Pemerintah dalam Menangani Covid-19

JAKARTA (IM) - Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menindak tegas setiap informasi palsu atau hoax yang mengganggu upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Pernyataan tersebut disampaikan Komjen Agus kepada jajarannya dalam rapat virtual di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/7).

"Jika pelanggaran person to person terapkan RJ (restorative justice) dan SE Kapolri, tetapi jika yang berkaitan mengganggu upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19, ini tindak tegas," katanya. "Jangan sampai masyarakat ini bingung dengan banyaknya berita bohong yang berkembang di masyarakat," kata Agus.

Agus juga menginstruksikan seluruh jajarannya melakukan pengawasan dan pengamanan penyerapan belanja modal di provinsi, kabupaten, dan kota.

Menurut Agus, dalam penanganan Pandemi Covid-19 ini, masih banyak provinsi yang ragu menyerap anggaran dan belanja modal. Sebab itu, ia meminta jajaran Reskrim betul-betul bijaksana dalam menangani perkara terkait dengan hal tersebut.

"Apabila ada kesalahan sedikit agar disikapi dengan bijaksana, yang terpenting ekonomis negara berputar anggaran dapat diserap seluruhnya dengan baik. Pengawasan dan pengamanan penyerapan anggaran ini bisa bekerja sama dengan Forkopimda dan kementerian/lembaga," ujar Agus.

## Polres Tanjung Jabung Barat Serahkan Sapi Kurban ke Kampung Terpencil di Jambi

JAMBI (IM) - Polres Tanjung Jabung Barat, Jambi, menyerahkan sapi kurban seberat 200 kilogram untuk warga di Jambi yang tinggal di kampung terpencil.

"Kampung ini hanya ada 65 Kepala Keluarga disana. Di kampung itu, para kepala keluarganya hanya seorang pencari ikan dan buruh di kebun orang. Di kampung ini pendapatan mereka tak banyak, dan mereka semua di kampung ini masuk dalam keluarga tidak mampu," kata Kapolres Tanjung Jabung Barat Jambi, AKBP Guntur Saputro, Selasa (20/7).

Kampung terpencil berada di kawasan Parit 10 Sungai Saren, Kecamatan Bram Itam, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Pemberian seekor sapi kurban oleh polisi tersebut lantaran kampung itu sudah hampir 76 tahun tak pernah melakukan penyembelihan hewan kurban. Ini kali kedua Polres Tanjung Jabung Barat memberikan hewan kurban ke warga di sana. Guntur mengatakan pihaknya mengantar sendiri sapi itu hingga diterima warga setempat.

"Kampung ini adalah kampung yang cukup jauh dari perkotaan. Untuk bawa sapi ke kampung itu juga tak bisa pakai mobil, lantaran akses jalannya tidak ada maka terpaksa kita jalan sejauh 3,5 Km untuk bisa tiba di kampung itu. Sampai disana, warga disana merasa bahagia, karena selain terbantu akan dapat jatah daging kurban, mereka-mereka juga kali pertama ikut laksanakan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kata Agus, telah menginstruksikan untuk melakukan pendampingan kepada kepala daerah agar tidak ragu menyerap anggaran.

"Bapak Kapolri membuka ruang selear-lebarnya kepada pejabat daerah di wilayah mengajukan komplain. Apabila ada rekan-rekan yang melakukan kriminalisasi akan dilakukan pemeriksaan oleh Propam," ucap Agus.

Di sisi lain, Kapolri, menurut Agus, telah menekankan seluruh anggota kepolisian untuk tidak bersifat arogan kepada masyarakat. Terlebih selama masa pelaksanaan PPKM Darurat.

"Jangan sampai tindakan yang kami lakukan ini sifatnya kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah. Mohon jajaran mengingatkan agar semua lini tidak bersifat arogan kepada masyarakat. Seperti contoh di Solo yang menggunakan bahasa daerah dan lebih persuasif," tutur Agus.

Agus mengingatkan, terkait dengan protokol kesehatan, kepada pedagang selagi menerapkan social distancing, maka hal tersebut masih diperbolehkan. Kecuali sudah melanggar jam operasional yang ditentukan.

Kemudian, Agus meminta jajarannya telah melakukan pengecekan setiap hari terkait dengan distribusi dan ketersediaan obat-obatan maupun oksigen.

"Kapolri mengingatkan bahwa Polri siap membantu pelaksanaan distribusi bantuan sosial kepada setiap daerah yang paling terdampak," kata Agus. • **lus**

penyembelihan hewan kurban di hari Raya Idul Adha," ujar Guntur.

Guntur berharap hewan kurban yang diserahkan Polres Tanjung Jabung Barat bisa membantu warga setempat. Dia berharap warga bisa bertahan di tengah pandemi Corona.

"Di tahun ini kita mencoba berbagi merayakan kurban bersama masyarakat masyarakat yang terdampak pandemi Corona. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan membawa hewan kurban dan menyembelih hewan kurban di kampung ini bisa memberikan kebahagiaan warga yang berada di kampung ini dan memudahkan bisa memulihkan serta membangkitkan kembali dan minimal bisa menjaga ketahanan pangan keluarganya di Hari Raya Idul Adha di masa pandemi Covid-19 ini," ujar Guntur.

Sementara itu, Ketua RT setempat, Zam Zam menyampaikan ucapan terima kasih kepada polisi atas bantuan hewan kurbannya itu. Mereka juga bahagia, lantaran kampung mereka udah puluhan tahun tak pernah rasakan menyembelih hewan kurban di hari raya.

"Kami mewakili masyarakat kampung ini mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak Kapolres Tanjung Barat beserta jajarannya. Mudah-mudahan hewan kurban ini bisa bermanfaat. Ini adalah hewan kurban pertama yang kami sembelih sejak 76 tahun lamanya," ujar Zam Zam. • **lus**

# 12 | PoliceLine



## OPERASI YUSTISI PPKM DARURAT DI KAWASAN PARIWISATA

Anggota Polisi menindak warga negara asing (WNA) yang tidak menggunakan masker saat operasi yustisi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di kawasan wisata Canggung, Badung, Bali, Senin (19/7). Operasi yustisi yang digelar di kawasan pariwisata tersebut untuk mendisiplinkan masyarakat dan WNA agar menaati peraturan protokol kesehatan khususnya penggunaan masker saat beraktivitas selama PPKM Darurat sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

# Polisi Janji Selidiki Dugaan Kartel Kremasi yang Peras Warga Saat Pandemi Covid-19

Polisi meminta warga yang menjadi korban pemerasan praktik kartel kremasi jenazah korban Covid-19 secara resmi melaporkan ke pihak kepolisian. Polisi pastikan akan mengusutnya.

JAKARTA (IM) - Aparat Polres Jakarta Barat menyatakan akan menyelidiki dugaan praktik kartel kremasi jenazah korban Covid-19 di Jakarta.

"Pasti akan kami selidiki. Segala yang meresahkan di masyarakat pasti kami selidiki," kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, Kompol Joko Dwi Harsono, Senin (19/7).

Joko mengimbau warga yang menjadi korban praktik kartel kremasi melaporkan kasus yang mereka alami ke pihak kepolisian agar polisi dapat mendapatkan informasi yang lengkap terkait kasus tersebut. Sebab hingga saat ini pihak kepolisian belum ada menerima laporan resmi tersebut.

"Kami memerlukan infor-

masi yang sekecil-kecilnya dan selengkapnya. Kami berharap korban mau hadir memberi informasi," ujar Joko.

Baru-baru ini beredar pesan berantai lewat media sosial (medsos) Whatsapp terkait kasus 'kartel kremasi'. Melalui pesan berantai yang diberi judul 'Diperas Kartel Kremasi', korban bernama Martin yang merupakan warga Jakarta Barat, mengatakan bahwa ibunya meninggal dunia pada 12 Juli lalu.

Dinas Pemakaman membantu mencari krematorium untuk ibunya dari Martin.

"Kemudian kita dihipnotis orang yang mengaku Dinas Pemakaman menyampaikan bahwa paket kremasi Rp 48,8 juta, jenazah bisa segera dikre-

masi di Karawang, dan harus cepat karena RS lain juga ada yang mau ambil slot ini," tulis orang bernama Martin dalam pesan tersebut.

Martin mengaku terkejut dengan biaya yang disebutkan petugas. Pasalnya, enam minggu sebelumnya, kakak Martin meninggal dunia dan dikremasi dengan biaya tak sampai Rp 10 juta. Dua minggu setelahnya, besan dari kakak Martin dan anak perempuannya juga meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19. Saat itu biaya yang dikeluarkan ialah sebesar Rp 24 juta per orang.

"Bagaimana harga bisa meroket begini tinggi dalam waktu singkat?" kata Martin.

Martin mencoba menghubungi beberapa krematorium di wilayah Jabodetabek. Namun, sebagian besar tidak mengangkat teleponnya. Sementara sebagian yang mengangkat telepon mengatakan krematorium sudah penuh.

Tak menyerah, Martin mencoba menghubungi pihak yang dulu mengurus kremasi kakaknya. Namun, pihak terse-

but mengatakan memang biaya telah melonjak seperti yang dikatakan petugas yang mengaku dari Dinas Pemakaman DKI Jakarta.

"Kemudian dia juga ditawarkan Rp 45 juta, jenazah juga bisa segera dikremasi tapi besok di Cirebon. Dari teman kami juga mendapat beberapa kontak yang biasa mengurus kremasi. Ternyata slot bisa dicarikan tapi ada harganya, bervariasi dari Rp 45 juta sampai Rp 55 juta," kata Martin.

Sementara, pihak rumah sakit mendesak Martin dan keluarga untuk dapat segera memindahkan jenazah. Lantaran terdesak, keluarga memilih untuk melakukan kremasi di Karawang, yakni krematorium yang ditawarkan petugas yang mengaku dari Dinas Pemakaman.

Sayangnya, petugas mengatakan bahwa slot kremasi di Karawang sudah diambil orang lain. Namun, petugas mengatakan bahwa kawannya akan mencari tempat lain. Tak lama, petugas tersebut mengabarkan bahwa ia mendapat slot kremasi untuk lima hari ke depan, di krematorium pinggir kota dengan biaya Rp 65 juta.

"Segera kami mengerti bahwa kartel telah menguasai jasa mengkremasi anak family korban C-19 dengan tarif 45 sd 65 juta," kata Martin.

Martin sekeluarga pun memutuskan untuk mengkremasi jenazah kakaknya di Cirebon. Keesokan harinya, Martin sekeluarga tiba di Cirebon sekitar pukul 09.30 WIB. Sementara, mobil jenazah ibu Martin sudah sampai pada pukul 07.00 WIB. Martin sekeluarga kemudian mengecek isi peti jenazah yang dibawa mobil tersebut.

"Ternyata di dalam mobil jenazah tersebut ada peti jenazah lain, rupanya satu mobil sekaligusangkut dua jenazah," kata Martin.

Sambil menunggu giliran kremasi, Martin berbincang

dengan pengurus kremasi. Pihak pengurus kremasi mengatakan bahwa hanya ada satu harga kremasi, yakni Rp 2,5 juta. Namun, biaya tambahan memang dikenakan ketika harus melakukan kremasi dengan prosedur Covid-19.

Pasalnya, harus ada pengadaan alat pelindung diri (APD), penyemprotan dan lain-lain. Tetapi, biaya tambahan hanya beberapa ratus ribu rupiah saja.

"Betapa nyamannya kartel ini 'merampok' keluarga yang berduka, karena biaya peti dan biaya mobil jenazah (satu mobil dua jenazah) harusnya tidak sampai Rp 10 juta," kata Martin.

"Mereka ini hanya berbekal telepon saja dan bisa booking slot di krematorium, tidak perlu nongol sementara orang lapangan, orang kecil, yang bekerja dan tidak merasakan tetesan keuntungan ini," imbuhnya.

Selanjutnya, pada 17 Juli 2021, istri Martin mendapat kabar bahwa kenalan dari keluarganya meninggal dunia akibat Covid-19. Awalnya, pihak keluarga berniat melakukan kremasi. Namun, niat itu diurungkan lantaran biaya yang dibebankan adalah Rp 80 juta. Itu pun harus mengantre bebrap hari.

Akhirnya, pihak keluarga memutuskan untuk mengubur jenazah di TPU Rorotan yang tak dipungut biaya apapun.

"Bila kebetulan Pak Anies ada turut membaca curhatan saya kepada teman-teman. Sebagai warga DKI ingin saya sampaikan permohonan agar Bapak selaku Gubernur DKI, baiknya segera menindak tegas bila ada aparat pemakamannya yang berbuat fungsi menjadi calo mencari keuntungan (mereka bekerja sama dengan petugas jenazah di RS dan staf krematorium yang punya hak mengatur slot)," tulis Martin.

Ia berharap para pelaku dapat ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. • **lus**

## Kapolres Sebut Kejahatan di Jakbar Turun 12 Persen Selama PPKM Darurat

JAKARTA (IM) - Kapolres Metro Jakarta Barat (Jakbar) mengatakan situasi kamtibmas di wilayah Jakarta Barat cukup kondusif selama pelaksanaan PPKM Darurat. Angka kejahatan di Jakarta Barat diklaim cenderung menurun.

"Alhamdulillah kalau saya melihat dari kegiatan kriminalitas cukup kondusif, tidak ada lonjakan angka kriminalitas. Tidak ada lonjakan angka, artinya situasi kamtibmas kaitannya dengan angka kriminalitas ada penurunan," kata Ady kepada wartawan di Jakarta Barat, Selasa (20/7). Ady menyebutkan angka kriminalitas di Jakarta turun hingga 12 persen selama PPKM Darurat berlaku 3-20 Juli ini.

"Kalau saya melihat penurunan sekitar 12 persen. Sebelumnya (diberlakukan PPKM darurat) juga, kan kita hitungnya satu bulan ya," ucapnya.

Ady menambahkan situasi kamtibmas di wilayah Jakarta Barat pada malam takbiran Idul Adha juga kondusif. Pihaknya mengklaim tidak menemukan adanya kerumunan warga yang melaksanakan takbir keliling tadi malam. "Alhamdulillah dari beberapa titik, delapan kecamatan

yang saya lihat di lapangan tidak ada yang lakukan takbir keliling. Mereka melakukan takbir di lokasi masjid 3-5 orang, mengumandangkan takbir kemudian ada yang di rumah, seperti itu," jelasnya.

Selain angka kriminalitas, menurut Ady, kasus Covid-19 di wilayah Jakarta Barat mengalami penurunan. "Kalau saya melihat khusus di Jakarta Barat sudah mulai ada penurunan sejak tanggal 12 Juli. (Dilihat) dari aplikasi yang kita miliki, dari aplikasi yang kita lihat dari Sudinkes Jakarta Barat kita lihat ada tren penurunan grafik terkonfirmasi positif harian," kata Ady.

"Artinya itu sepuluh hari setelah-sekitar 10 hari sejak diberlakukannya PPKM darurat--ada penurunan grafik dan penambahan sudah mulai ada penurunan, penambahan harian ya. Itu sudah kita lihat ada penurunan. Sempat di angka 2.500, 1.700, sekarang di angka 1.500, kemarin di angka 800," jelasnya.

Meski begitu, Ady mengajak masyarakat tetap waspada. Masyarakat diimbau menaati protokol kesehatan dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. • **lus**



MOBILITAS WARGA KAWASAN AGLOMERASI PADA IDUL ADHA Warga mengendarai motor melintasi di Pos Penyekatan Mobilitas Masyarakat pada PPKM Darurat di Jalan Raya Bogor, Jakarta, Selasa (20/7/2021). Mobilitas warga di kawasan aglomerasi terpantau lebih rendah dibandingkan di hari biasa masa PPKM Darurat menyusul himbauan Menteri Agama untuk membatasi aktivitas warga untuk bepergian atau mudik pada Hari Raya Idul Adha.